

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rakyat telah mempercayakan dan memberikan amanat kepada pemerintah agar dapat melaksanakan segala aktivitas dalam pemerintahan dan kenegaraan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menyampaikan informasi yang ada dalam proses pemerintahan termasuk informasi keuangan dan kinerja pemerintahan agar dapat membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah (Verawaty, 2017). Dengan adanya pelayanan dan penyampaian informasi oleh pemerintah, masyarakat akan mempercayai pemerintah mengenai amanat yang telah diberikan dan akan lebih mendukung dalam proses berjalannya pemerintahan. Di era global ini, pemerintah memanfaatkan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam memberikan pelayanan dan penyampaian informasi yaitu dengan penerapan *E-Government*.

Masyhur (2016) dalam hasil penelitiannya menyampaikan bahwa saat ini teknologi semakin mudah untuk diakses, TIK dapat memberikan efisiensi, kecepatan dalam menyampaikan informasi, dapat menjangkau secara global dan transparansi. Dengan adanya perkembangan teknologi di era reformasi ini, *E-Government* merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang *Good Governance* dengan memanfaatkan perkembangan TIK (Verawaty, 2017). Penerapan *E-Government*

dimaksudkan untuk menjadikan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel (Masyhur, 2016). Keputusan pemerintah dalam pelaksanaan *E-Government* untuk mencapai pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel di dukung oleh Firman Allah SWT, An-Nisa' Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

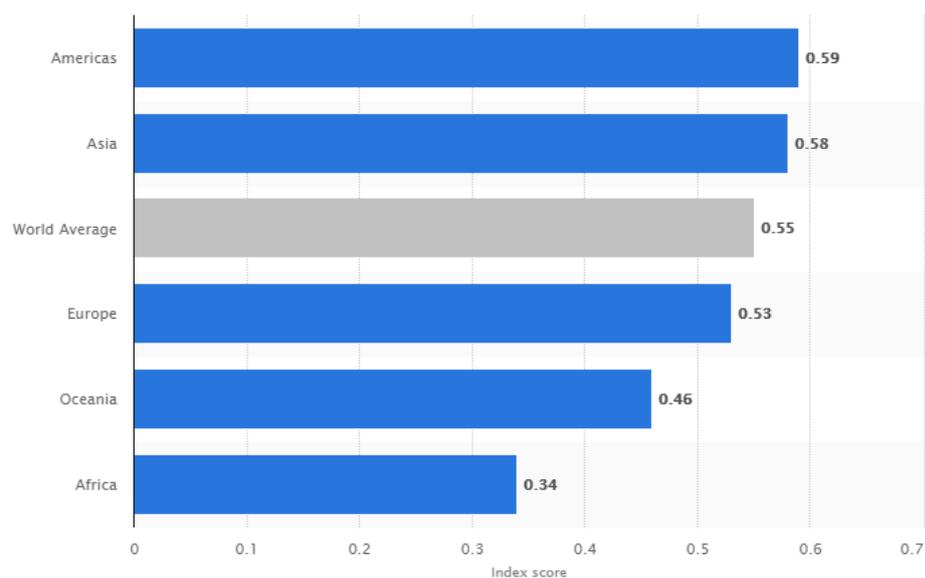
Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”. (Q.S. An-Nisa': 58)

Ayat tersebut telah menegaskan bahwa sebagai orang yang beriman, seharusnya menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerima. Hal itu dilakukan untuk membangun keadilan dan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempublikasikan peringkat EGDI (*E-Governmnet Development Index*) dari survei yang dilakukan oleh *United Nations* pada tahun 2018 yang dapat dilihat pada Tabel 1.1. Dari hasil survey yang dilakukan, dapat dilihat bahwa diantara semua negara yang menerapkan *E-government* masih terdapat perbedaan *performance*.

Negara-negara dengan penghasilan rendah dan infrastruktur yang kurang memadai dapat menyebabkan adanya kesenjangan digital (*digital divide*). Nilai indeks rata-rata regional untuk negara-negara di Afrika dan Oseania secara signifikan lebih rendah daripada rata-rata EGDI dunia

sebesar 0,55, terdiri dari 0,34 untuk Afrika dan 0,46 untuk Oseania. Negara-negara ini juga berpenghasilan rendah dan cenderung menghadapi kendala dalam mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan e-government. Dalam tingkat pengembangan e-government, negara-negara di kawasan Afrika dan Oseania memiliki kesenjangan digital yang cukup tinggi (United Nations, 2018).

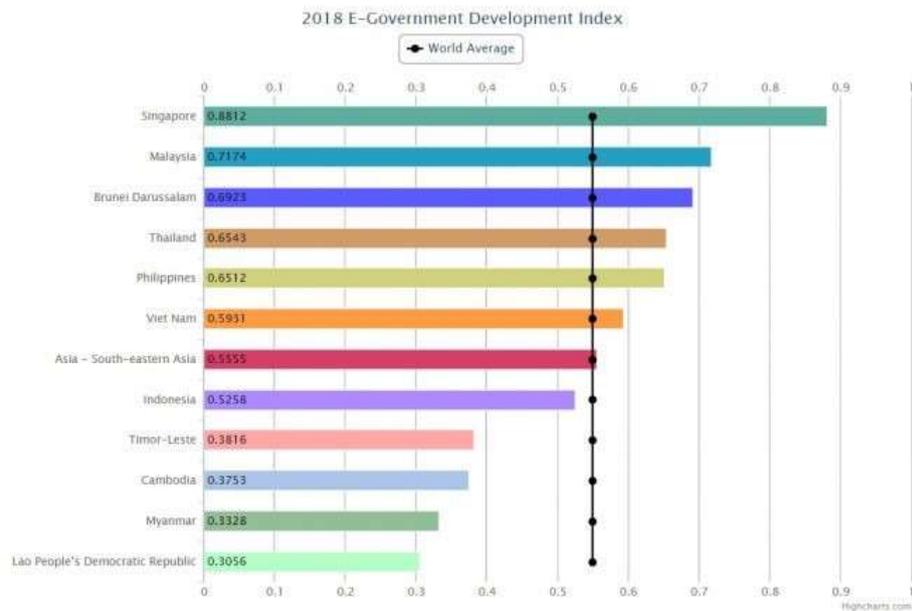


sumber: statistic.com

Gambar 1.1
E-Government Development Index (EGDI) of global regions in 2018
(index rating)

Instruksi presiden No. 3 tahun 2003 mengenai kebijakan strategi dalam pengembangan *E-Government* mengamanatkan agar Pemerintah Daerah di Indonesia untuk mengembangkan *E-Government*. Namun demikian, pengembangan *E-Government* di Indonesia masih belum terlaksana secara optimal (Napitupulu, 2014). Hal ini dapat dibuktikan dari gambar 1.2 yang menunjukkan hasil survey EGDI (*E-Government Development Index*) dalam lingkup wilayah ASEAN yang dilakukan oleh

United Nations dengan menunjukkan seberapa jauh pengembangan *E-government* oleh negara-negara di ASEAN. Survey ini dilakukan dengan tiga dimensi, yaitu: penyediaan layanan online, konektivitas telekomunikasi, dan kapasitas manusia.



Sumber: publicadministration.un.org

Gambar 1. 2
Hasil Survey EDGI dalam lingkup ASEAN

Kualitas layanan *E-Government* menggambarkan kinerja dari implementasi *E-Government*. Peningkatan *E-Government* Indonesia (PeGI) merupakan inisiatif dari kominfo yang digunakan untuk peningkatan atas kualitas dari layanan dan penyampaian informasi yang diberikan dalam implementasi *E-government* di Indonesia. Peningkatan dilakukan untuk mendorong pemerintah dalam mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Peningkatan dengan model PeGI menggunakan lima dimensi, yaitu

dimensi kebijakan, dimensi kelembagaan, dimensi infrastruktur, dimensi aplikasi dan dimensi perencanaan.

Pada Tabel 1.1 ditunjukkan hasil pemeringkatan *E-Government* yang diterapkan setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2015.

Tabel 1. 1
Hasil Survey PeGI Tingkat Provinsi di Indonesia Tahun 2015

Provinsi	Nilai Rata-rata PeGI	Kategori
Dki Jakarta	3,394	Baik
Jawa Barat	3,066	Baik
Jawa Timur	3,008	Baik
Gorontalo	2,946	Baik
Bangka Belitung	2,898	Baik
D.I.Yogyakarta	2,66	Baik
Jawa Tengah	2,64	Baik
Bali	2,626	Baik
Sumatera Utara	2,62	Baik
Jambi	2,612	Baik
Nusa Tenggara Barat	2,54	Kurang
Kalimantan Timur	2,52	Kurang
Aceh	2,504	Kurang
Sumatera Selatan	2,332	Kurang
Sumatera Barat	2,012	Kurang
Kalimantan Selatan	1,878	Kurang
Lampung	1,758	Kurang
Sulawesi Tengah	1,734	Kurang
Sulawesi Barat	1,72	Kurang
Bengkulu	1,538	Kurang

Sumber : <https://data.kominfo.go.id/>

Adelfina dan Jember (2016) mengatakan bahwa pemeringkatan PeGI dilakukan dengan kategori sebagai berikut: sangat baik = 3,60 - 4,00; baik = 2,60 < 3,60; kurang= 1,60 < 2,60; sangat kurang = 1,00 < 1,60. Dalam pemeringkatan tersebut, penerapan *E-Government* dengan kategori

baik hanya dimiliki 10 dari 20 provinsi yang mengikuti survey. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan dalam penerapan *E-Government*. Rendahnya performa pelaksanaan *E-Government* di setiap provinsi kemungkinan menjadi faktor rendahnya tingkat pelaksanaan *E-Government* Indonesia pada Peningkatan EDGI yang dilihat pada Gambar 1.2.

Tersedianya *E-Government* dalam tiap-tiap kementerian dan pemerintahan daerah merupakan salah satu kriteria dalam keberhasilan reformasi birokrasi dengan harapan transparansi, akuntabilitas, dan standarisasi proses penyelenggaraan pemerintahan dapat terselenggara (Permenpan RB No. 11 Tahun 2011). Paradigma dan peran penting *E-Government* dalam pemerintahan masih belum dipahami oleh aparat pemerintahan dengan benar dan cenderung hanya mengikuti trend teknologi (Putri, 2015). Terselenggaranya *E-Government* hanya merupakan formalitas kepatuhan terhadap kebijakan dan instruksi dengan tidak memperhatikan kualitas (Napitupulu, 2017).

Dalam pengembangan *E-Government* boleh jadi ditentukan oleh beberapa faktor seperti kemandirian daerah, pertumbuhan ekonomi, luas wilayah dan jumlah penduduk di suatu pemerintahan daerah. Ketersediaan dana menjadi faktor dalam penerapan *E-Government*. Penganggaran dana untuk *E-Government* diperlukan untuk digunakan sebagai biaya operasional maupun untuk perawatan perangkat yang digunakan. Sebagai negara yang terdesentralisasi, setiap pemerintahan daerah dalam melaksanakan pemerintahannya tidak hanya mengandalkan dana dari pusat tetapi juga

diperlukan adanya kemandirian daerah. Dalam penelitian yang dilakukan Ramadhani (2016) menunjukkan hasil bahwa kemandirian keuangan daerah dan efektivitas keuangan daerah menyebabkan Kota Tarakan mampu menjalankan dan melaksanakan otonomi daerah secara finansial. Kekayaan daerah yang baik akan menunjukkan kinerja pemerintahan daerah yang baik akan menunjukkan kepada pemangku kepentingan dan mengungkap lebih banyak informasi dengan teknik pengungkapan yang lebih baik (Marian dan Utami, 2019). Publikasi secara mudah cepat dan murah dapat dilakukan dengan penggunaan TIK dalam pemerintahan yaitu *E-Government*. Prasasti dkk. (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa kemandirian daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi pada situs resmi pemerintah daerah. Maka dengan Kemandirian Keuangan Daerah yang baik, pemerintah daerah akan lebih mengoptimalkan perkembangan *E-Government* sebagai sarana dalam pengungkapan berbagai informasi.

Faktor lain yang mungkin berkaitan dengan implementasi *E-Government* adalah pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian yang dilakukan Hasanur dan Putra (2017) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Kawasan Barat Selatan Aceh. Peningkatan PAD dapat meningkatkan investasi daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik (Wulandari dkk., 2013). *E-Government* merupakan salah satu investasi yang dapat mendorong pelayanan publik diberikan pemerintahan daerah,

sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat pelaksanaan *E-Government*

Luas wilayah juga menjadi salah satu faktor yang mungkin berhubungan dengan tingkat implementasi *E-Government*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurlaela dkk. (2018) luas Wilayah berpengaruh positif secara signifikan terhadap Belanja Modal di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Belanja modal digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan fasilitas sebagai pelayanan publik (Halim, 2002:72). Hal ini dapat diinterpretasikan apabila daerah yang memiliki wilayah yang luas, maka belanja modalnya juga akan tinggi. Retno dan Widiatmoko (2019) beranggapan bahwa dalam konsep teori *stewardship*, luas wilayah diindikasikan dapat meningkatkan pelayanan publik dengan menyediakan sarana maupun prasarana di setiap wilayah dengan cara efektif.

Implementasi *E-Government* juga mungkin dapat dipengaruhi oleh faktor jumlah penduduk. Penelitian yang dilakukan oleh Devita dkk. (2014) menunjukkan hasil bahwa jumlah Penduduk berhubungan negatif terhadap belanja langsung pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Dalam penelitiannya juga dikatakan bahwa jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap penggunaan belanja daerah dan persebarannya, sehingga hanya akan menuntut pelayanan sosial. Pengalokasian belanja modal menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pengalokasian tersebut didasarkan pada kebutuhan akan sarana dan

prasarana maupun fasilitas publik (Kaunang dkk. 2016). Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif dari jumlah penduduk terhadap pelayanan publik. *E-Government* merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan publik, sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk memiliki hubungan terhadap tingkat pelaksanaan *E-Government*.

Tingkat pelaksanaan *E-Government* dalam penerapannya mungkin juga dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Kinerja keuangan memiliki korelasi yang positif terhadap pelayanan publik (Tamawiwiy dkk. 2016). Kinerja keuangan digunakan untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien (Mardiasmo, 2002). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pelaksanaan *E-Government* memiliki hubungan dengan kinerja keuangan.

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa merupakan beberapa pemerintahan yang sudah mengimplementasikan *E-Government* dalam mewujudkan pemerintahan yang terdesentralisasi (Kominfo, 2017). Berdasarkan pemeringkatan PeGI yang dilakukan pada tahun 2015, dari nilai rata-rata provinsi-provinsi di Pulau Jawa diantaranya Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten termasuk dalam kategori baik. Hal ini menjadi alasan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa sebagai subjek dan sebagai contoh bagi

Pemerintahan Daerah dalam mengembangkan kualitas layanan *E-Government* yang baik.

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti mengenai pengaruh berbagai fasilitas dan infrastruktur yang dimiliki pemerintah daerah terhadap kualitas layanan *E-Government*. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin (2019) yang ditemukan terdapat pengaruh konvergensi teknologi, informatika dan komunikasi terhadap penerapan *E-Government* dan penelitian oleh Tampubolon (2016) tentang pemanfaatan teknologi informasi ditemukan bahwa masyarakat lebih banyak mengakses *E-Government* menggunakan perangkat selular (*smartphone*). Namun penelitian yang menguji pengaruh dari aspek kinerja keuangan daerah, aspek demografis dan aspek geografis masih jarang dilakukan, sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui faktor lain yang berhubungan terhadap kualitas pelayanan *E-Government*. Berangkat dari fenomena dan penelitian terdahulu, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh dari kemandirian daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, jumlah penduduk dan luas wilayah terhadap tingkat pelaksanaan.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Zainuddin (2019) dalam penelitian yang dilakukan mengenai efektivitas penerapan *E-Government* di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Zainuddin (2019) menggunakan pelayanan *E-Government* sebagai variabel dependen, sedangkan konvergensi dan teknologi, negara dan politik, sosial ekonomi, pemberdayaan masyarakat digunakan sebagai

variable independen. Sementara pada penelitian ini, variabel independen yang diduga berhubungan dengan tingkat pelaksanaan *E-Government* yaitu pertumbuhan ekonomi, kemandirian daerah, luas wilayah dan jumlah penduduk dan Penambahan variabel kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi karena keadaan finansial suatu daerah dapat berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan jumlah penduduk dan luas wilayah ditambahkan karena seberapa luas wilayah dan berapa jumlah orang yang berkepentingan dirasa akan mempengaruhi keefektivan dan efisiensi penyampaian informasi dan layanan *E-Government*. Perbedaan dengan penelitian terdahulu juga terdapat pada pemilihan sampel, peneliti memilih pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di Pulau Jawa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat ditarik masalah sebagai berikut :

1. Apakah tingkat pertumbuhan ekonomi berhubungan terhadap tingkat pelaksanaan *E-Government* yang di terapkan di Pemerintahan Daerah?
2. Apakah Kemandirian daerah berhubungan terhadap tingkat pelaksanaan *E-Government* yang di terapkan di Pemerintahan Daerah?
3. Apakah Luas Wilayah berhubungan terhadap tingkat pelaksanaan *E-Government* yang di terapkan di Pemerintahan Daerah?

4. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap tingkat pelaksanaan *E-Government* yang di terapkan di Pemerintahan?
5. Apakah tingkat pelaksanaan *E-Government* berhubungan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintahan Daerah?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengembangan dari *E-Government* yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Pulau Jawa. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan lain dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pelaksanaan *E-Governmnet* yang di terapkan di Pemerintahan Daerah.
2. Untuk menguji secara empiris hubungan kemandirian daerah terhadap tingkat pelaksanaan *E-Governmnet* yang di terapkan di Pemerintahan Daerah.
3. Untuk menguji secara empiris hubungan luas wilayah terhadap tingkat pelaksanaan *E-Governmnet* yang di terapkan di Pemerintahan Daerah.
4. Untuk menguji secara empiris hubungan jumlah penduduk terhadap tingkat pelaksanaan *E-Governmnet* yang di terapkan di Pemerintahan.
5. Untuk menguji secara empiris hubungan tingkat pelaksanaan *E-Government* terhadap akuntabilitas kinerja pada Pemerintahan Daerah.

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan mengenai konsep *stewardship* dalam pelaksanaan *E-Government*, terutama penerapan *E-Government* pada pemerintah daerah. Penelitian ini dapat menjadi sarana untuk memberikan bukti empiris mengenai hubungan pertumbuhan ekonomi, kemandirian daerah, luas wilayah dan jumlah penduduk dengan tingkat pelaksanaan *E-Government* dan hubungan tingkat pelaksanaan *E-Government* dengan kinerja keuangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan kajian bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan mengenai pelaksanaan *E-Government*. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memicu pemerintah agar lebih memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi pengembangan dalam melaksanakan *E-Government*, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan lebih efektif dan efisien.

2. Manfaat bagi pemerintahan

Penelitian ini diharapkan memberikan input kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait berbagai faktor yang berhubungan terhadap pengembangan *E-Government* di Indonesia.